

FAKTOR PRNENTU KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2015-2017)

Ernawati

theresiana.ernawaty@gmail.com

Jaeni*

jaeni@edu.unisbank.ac.id

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh factor penentu kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan proksi ukuran (*size*), Kemakmuran (*wealth*), ukuran legeslatif, *intergovernmental revenue* dan *leverage*. Penelitian ini meneliti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mengambil sampel 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah daerah dan Kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Sedangkan Ukuran Legislatif berpengaruh Negatif Signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017, dan *Intergovernmental Revenue* dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017.

Kata Kunci : kinerja kuangan, ukuran pemrintah daerah, kemakmuran, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, dan *leverage*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the Determinants of Financial Performance of District / City Governments in Central Java Province. This study discusses the financial determinants of local government using proxy measures (size), Prosperity (wealth), legislative measure, intergovernmental income and leverage. This study discusses the Local Government Financial Report (LKPD) by taking a sample of 35 districts / cities in Central Java in 2015-2017. The data used in this research is secondary data. The analytical tool used in this research is multiple linear regression. The results of this study show that the size of the Regional Government and Prosperity is not related to the financial performance of the Regency / City of Central Java Province in 2015-2017. While Legislative Measures play a significant negative role in the Financial Performance of District / City Governments in Central Java in 2015-2017, and Intergovernmental Income and Leverage does not affect the financial performance of Regency / City Governments in Central Java in 2015-2017.

Keywords: financial performance, local government size, prosperity, legislative size, intergovernmental income, and leverage.

PENDAHULUAN

Pengelolaan kinerja pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU no. 33/2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah memberikan kewenangan penyelenggaraan daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab bagi pemerintah

kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot). Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peranan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggungjawab penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga diharapkan masing-masing daerah akan lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif. Upaya peningkatan daya saing,

Pemerintah kabupaten/kota membutuhkan manajemen keuangan daerah yang profesional. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk menjalankan roda pemerintahan daerah tersebut. Kemampuan daerah menjalankan roda pemerintahan merupakan gambaran dari kinerja pemerintah daerah. Dapat dikatakan bahwa komponen penting yang diperlukan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan adalah kemampuan pemerintahan menggali kekayaan asli daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Kemampuan daerah untuk mencapai tujuan tersebut disebut kinerja pemerintahan daerah. Sehubungan dengan efektifitasnya otonomi daerah maka kinerja pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas daerah melalui penggalan kekayaan asli daerah.

penelitian ini mengacu pada penelitian dari Abdillah (2016) yang berjudul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya penelitian menambahkan satu variabel independen dan mengganti satu variabel independen yaitu variabel leverage dan variabel pendapatan daerah diganti dengan variabel *intergovernmental revenue*.

Penelitian ini berusaha mengembangkan penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor penentu kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah? 2) Apakah kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah? 3) Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah? 4) Apakah

intergovernmental revenue berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah? 5) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* dapat menjelaskan ekstensi pemerintahan daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, steward mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas.

Goal Setting Theory (Teori Penetapan Tujuan)

Menurut teori ini salah satu dari karakteristik perilaku yang mempunyai tujuan yang umum diamati ialah bahwa perilaku tersebut terus berlangsung sampai perilaku itu mencapai penyelesaiannya, sekali seseorang mulai sesuatu (seperti suatu pekerjaan, sebuah proyek baru), ia terus mendesak sampai tujuan tercapai. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kerja yang ingindi capai oleh individu. *Goal setting theory* mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan (Robbins, 2008).

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka

APBD (Bab 1, Pasal 1, Ayat 5 Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005). Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan. Keuangan daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut sedermayati (2003:64) “Kinerja (*performance*) diartikan sebagai hasil seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat diukur dengan standar yang telah ditentukan”. Faktor kemampuan sumber daya aparatur pemerintah terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan *ability (knowledge + Skill)*, sedangkan faktor motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) sumber daya aparatur pemerintah dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan sumber daya aparatur pemerintah dengan terarah untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu *good governance*.

Ukuran Pemerintah Daerah (Size)

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variable dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991).

Dalam penelitian ini, total asset atau total aktiva pemerintah daerah dipilih sebagai tolak ukur dalam menentukan ukuran suatu pemerintahan daerah. Total asset dipilih karena nilainya yang lebih stabil dari pada pendapatan, jumlah pegawai ataupun total produksi suatu daerah. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan.

Kemakmuran (Wealth)

Kemakmuran adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Kemakmuran suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam

ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga berbeda. Kebanyakan dari penelitian terdahulu kemakmuran dicerminkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. PAD yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang optimal dalam menggali sumber-sumber PAD sehinggamemilikitingkatkemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dengan PAD yang masih rendah.

Ukuran Legislatif

lembaga Legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negara. Di Indonesia lembaga ini dijalankan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). DPRD merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Besarnya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga berdampak baik dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Intergovernmental Revenue

Intergovernmental Revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali. *Intergovernmental Revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (UU No 33 Tahun 2004). Dana perimbangan merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan disebut juga transfer dilakukan oleh pemerintah pusat guna mendukung pendanaan program otonomi.

Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu daerah tergantung pada kreditur dalam membiayai aset daerahnya. *Lverage* berhubungan dengan penggunaan aktiva atau dana dimana penggunaan aktiva tersebut pemerintah daerah harus menutup biaya tetap atau beban tetap. Penelitian yang dilakukan oleh Minarsih (2015) mengungkapkan bahwa *laverage* merupakan proposi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah utang lebih besar dari pada modal sendiri maka hal tersebut menggambarkan sumber dana dari entitas tersebut berasal dari pihak eksternal.

METODDE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Se-Jawa Tengah yang berjumlah 35 daerah. Kabupaten/Kota tersebut menyajikan laporan realisasi anggaran tahun 2015-2017 dalam website resmi daerah.

Menurut Mason dan Douglas (1996) pada penelitian (Risky Sulfa, 2018) sampel adalah satu porsi atau bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Dalam penelitian ini sampelnya adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menyajikan data mengenai *size*, *wealth*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, *leverage* dan kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun 2015 – 2017.

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder dengan metode sensus yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan APBD ini diperoleh data di internet (www.djpk.depkeu.go.id). Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai *size*, *wealth*, ukuran legislatif,

intergovernmental revenue, *leverage*, dan kinerja keuangan pemerintah daerah tahun 2015 – 2017.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1: Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
KUPD	98	,72	1,10	,9005	,08463
Size	98	20,95	24,13	21,8838	,51997
Wealth	98	,09	,45	,1705	,06089
IR	98	,06	1,86	,6606	,20526
Les	98	25,00	50,00	44,5408	7,18269
LVG	98	,00	,08	,0087	,01174

Jumlah sampel (N) pada tabel diatas sebanyak 99 sampel. Hasil perhitungan pada variabel *Size* nilai rata-ratanya adalah sebesar 21,8838, nilai minimum variabel *size* adalah 20,9529 yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kab. Tegal pada tahun 2015 dan maximum variabel *size* sebesar 24,1258 dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang pada tahun 2017. Nilai standar deviasi sebesar 0,51997.

Pada variabel *wealth*, hasil penelitian rata-ratanya adalah sebesar 0,1705, nilai minimum pada variabel *wealth* sebesar 0,0948 yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kab Blora pada tahun 2015, nilai maximum pada variabel *wealth* sebesar 0,4519 yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang pada tahun 2017. Nilai standar deviasi sebesar 0,06089.

Pada Variabel ukuran Legislatif, hasil penelitian rata-ratanya adalah sebesar 44,5408, nilai minimum pada variabel ukuran legislatif sebesar 25, sedangkan nilai maximum pada variabel ukuran legislatif sebesar 50. Nilai standar deviasi sebesar 7,18269.

Pada variabel *intergovernmental revenue*, hasil penelitian rata-ratanya adalah sebesar 0,6606, nilai minimum pada variabel *intergovernmental revenue* adalah sebesar 0,0631 yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kab. Jepara pada tahun 2017, sedangkan nilai maximum pada variabel *intergovernmental revenue* adalah sebesar 1,8559 yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kab. Kudus pada tahun 2016. Nilai standar deviasi sebesar 0,20526.

Pada variabel *leverage*, hasil penelitian rata-ratanya adalah sebesar 0,0087, nilai minimum pada variabel *leverage* adalah sebesar 0,0004 yang terdapat di kab. Magelang 2016,

nilai maximum sebesar 0,08 yang terdapat di Kab. Magelang 2017 sebesar 0.0763. Nilai standar deviasi sebesar 0,01174.

Pada variabel kinerja keuangan Pemerintah Daerah, hasil penelitian rata – ratanya adalah sebesar 0,9005, nilai minimum sebesar 0,72 yang dimiliki pemerintah daerah Kab. Klaten pada tahun 2017sebesar 0,7152, sedangkan nilai maximum sebesar 1,10 yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara 2015 sebesar 1,0987. Nilai standar deviasi sebesar 0,08463.

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

	N		Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	98	,048	-,244	,081	-,081	,483

Uji normalitas data dapat ditentukan dengan melihat distribusi residual dari model regresi. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji Skewness dan Kurtosis. Data akan terdistribusi normal jika nilai Zskewness dan Zkurtosis kurang dari 1,96

Sumber : (lampiran 2, hal 92)

$$Zskewness = \frac{0,048}{\sqrt{6/98}} = \frac{0,048}{0,247} = 0,19$$

$$Zkurtosis = \frac{-0,081}{\sqrt{24/98}} = \frac{-0,081}{0,494} = -0,16$$

Dari tabel diatas diperoleh nilai z skewness untuk residual sebesar 0,19 dan kurtosis sebesar 0,16. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji tersebut terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Berikut menunjukkan hasil statistik deskriptif data penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Multikol

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	Size	,347
	Wealt	,377
	h	
	IR	,890
	Les	,482
	LVG	,809

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua nilai VIF variabel bebas dibawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,10. Dapat dinyatakan bahwa dalam regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,547 ^a	,299	,261	,07277	2,064

Uji Autokorelasi

Nilai Durbin – watson sebesar 2,064 lebih besar dari batas atas (du) 1,7795 dan kurang dari 2,2205 (4-du) maka dapat disimpulkan DW test terletak pada daerah tidak ada autokorelasi.

Uji Heteroskidastisitas

Uji heteroskidastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai variance kesalahan pengganggu atau residual bersifat konstan. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskidastisitas dilakukan uji heteroskidastisitas dengan menggunakan uji Gleser dengan hasil sebagai berikut:

Dari hasil Uji Gleser diatas dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskidastsitas yang dibuktikan dengan nilai signifikan semua variabel > 0,05.

Uji Koefisien Determinasi (Adjust R²)

Tabel 5. Nilai Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,547 ^a	,299	,261	,07277

Tabel 6. Hasil Uji Hetero

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-.048	,288		
Size	,004	,015	,053	,301	,764
Wealth	-.034	,121	-.048	-.285	,776
IR	,025	,023	,115	1,050	,297
LS	-3,200	,001	-.005	-.035	,972
LVG	-.296	,428	-.079	-.691	,491

berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai Adjust R² sebesar 0,261 atau 26,1%. Hal ini berarti variabel independen (*Size*, *Wealth*, Ukuran legislatif, *intergovernmental revenue* dan *leverage*) dapat menjelaskan variabel dependen (kinerja keuangan pemerintah daerah) hanya 26,1% sedangkan selebihnya sebesar 73,9% dijelaskan oleh variabel – variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pembahasan

Pengaruh ukuran (*size*) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pada penelitian ini ukuran (*size*) pemerintah daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada pemerintah daerah kab/kota di Jawa Tengah memiliki total aset yang rendah, yang artinya ukuran pemerintah daerah kab/kota di Jawa Tengah memiliki ukuran yang kecil sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota di Jawa Tengah kurang baik.

Pengaruh kemakmuran (*wealth*) terhadap kinerja keuangan pemrintah daerah

Pada penelitian ini kemakmuran (*wealth*) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini karena kemakmuran belum mampu untuk

memenuhi kebutuhan pemerintah kab/kota di Jawa Tengah. Semakin tingginya tingkat kemakmuran yang diprosikan dengan pendapatan asli daerah tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan oleh ketergantungan pemerintah daerah terhadap

dana perimbangan yang cukup tinggi sehingga pemerintah daerah kurang menggali potensi sumber – sumber pendapatan asli daerah.

Pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah

Pada penelitian ini ukuran legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, artinya peran dan

Tabel 7. Uji Anova^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,208	5	,042	7,839	,000 ^b
Residual	,487	92	,005		
Total	,695	97			

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan besarnya nilai F hitung adalah sebesar 7,839. Sedangkan nilai degree of freedom (dt) regression pada angka 5 dan nilai df residual sebesar 92. Kemudian hasil dari perhitungan menghasilkan tingkat signifikansi sebesar 0,000^b < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *size*, *wealth*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, dan *leverage*, berpengaruh terhadap pengungkapan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 8. Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-.048	,288		
Size	,004	,015	,053	,301	,764
Wealth	-.034	,121	-.048	-.285	,776
IR	,025	,023	,115	1,05	,297
LS	-3,200	,001	-.005	-.035	,972
LVG	-.296	,428	-.079	-.691	,491

fungsi pengawasan dari anggota legislatif belum berfungsi dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah masih belum diawasi dengan baik sehingga tidak ada peningkatan dari kinerja pemerintah daerah. Meskipun banyak jumlah anggota legislatif yang ada dan banyak pekerjaan yang harus dilakukan tetapi jika kurangnya pengawasan terhadap pemerintah daerah terutama pengawasan keuangan, yang dimana pemerintah daerah berkewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LKPD) kepada DPRD, maka kinerja pemerintah dapat menunjukkan hasil yang tidak baik.

Pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pada penelitian ini ditemukan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini karena Kabupaten/Kota di Jawa Tengah kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap dana perimbangan pemerintah daerah. Hal tersebut berimbas pada alokasi dana perimbangan dari pusat ke daerah yang bertujuan menjembatani celah fiskal yang belum dapat digunakan dengan baik. Dana transfer dari pemerintah pusat sebagian besar masih digunakan untuk belanja aparatur daerah. Akibatnya dana untuk pelayanan publik menjadi lebih sedikit sehingga membuat ketidak efektifan dalam penggunaan belanja daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa bukan seberapa besar dana yang diberikan kepada pemerintah daerah tetapi yang lebih penting adalah seberapa besar pengawasan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah atas dana yang telah diberikan tersebut.

Pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pada penelitian ini *leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan Kab/Kota di Jawa Tengah memiliki *leverage* yang tinggi sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi *leverage* yang dimiliki semakin

buruk buruk kinerja keuangan daerah. Artinya daerah tersebut belum mampu membiayai operasioanalnya sendiri sehingga membutuhkan dana pinjaman dari pihak eksternal.

SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Simpulan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2015-2017, maka kesimpulannya adalah :

1. ukuran (*size*) pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Kemakmuran (*Wealht*) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Ukuran Legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian – penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan penelitian dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah saja, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pemerintah Daerah di Indonesia.
2. Data yang diteliti berkenaan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di setiap daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah masih belum sepenuhnya lengkap, sehingga harus melakukan konfirmasi ulang ke BPK.
3. Periode pengamatan penelitian ini terbatas, sehingga sangat di mungkinkan akan memberikan hasil yang berbeda apabila periode pengamatan lebih panjang.

4. Penelitian dilakukan hanya menggunakan data sekunder laporan keuangan tahun 2015-2017, tanpa melakukan konfermasi dalam bentuk wawancara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisatul, Lucfia. DewiSaptantinah PA. Fadjar Harimurti. 2017. Pengawasan Interen, Sistem akuntansi keuangan daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Survey pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar). Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
- A Hasthoro, Handoko. Sunardi. 2016. Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Fakultas Ekonomi, Universitas Janabadra Yogyakarta
- Andriany Nasution, Nina,SE., Ak., M.Si. Fitri Yani Panggabean, SE.,M.Si. 2017. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utar. Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi
- Abdillah, Yuni. Nursiam. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Armaja. Ridwan Ibrahim. Aliamin. 2015. Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
- Budianto. Stanly W Alexander. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
- Donaldson.Lex, Davis James H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governace and Shareholders Return. Australia Jurnal of Management.
- Febrianto, Nova. 2018. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal, Ukuran Legislatif, Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi D.I.Y Tahun 2009 - 2016). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Halim. 2007. Analisis Laporan Keuangan ,Edisi 5. Yogyakarta
- Mulyani, Sri. Hardiyanto Wibowo. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental revenue* Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- M. Ali. Maisyuri. 2017. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Program Studi Akuntansi STIE Lhokseumawe
- Novyandra, Rokhim. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue, Leverage, Size, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Pulau Jawa Tahun 2014. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Novianti,In. Syamsidar. Cut FitrikaSyawalina. 2018. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
- RidhoNugroho, Tatas. Novi Eko Prasetyo. 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa timur. Fakultas Ekonomi

- Universitas Islam Majapahit. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora IKIP Budi Utomo Malang
- Satria, DyIlham. Heny Puspita Sari. 2018. Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage Dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe) .Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
- Saraswati,Dwi S.Pd, M.S. 2017Pengaruh Pendapatan, Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota Provisi Sumatera Utara. Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Skripsi Universitas Sebalas Maret Surakarta